

**KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM
PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

ADELIA NURLAILITA RAHMADANY
20300015

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025

**KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM PRAKTIK
HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUM MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ADELIA NURLAILITA RAHMADANY

20300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM
PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUM MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ADELIA NURLAILITA RAHMADANY

NPM: 20300015

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIBING

HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ADELIA NURLAILITA RAHMADANY

20300015

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12

JANUARI 2026 DAN DINYATAKAN TELAH

MEMENUHI PERSYARATAN SUSUNAN DEWAN

PENGUJI :

1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum (KETUA)

1



2. Ahmad Busuki, S.H., M.H

(ANGGOTA)

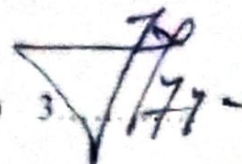
2



3. Hanung Widjankoro, S.H., M.H

(ANGGOTA)

3



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adelia Nurlailita Rahmadany

NPM : 20300015

Alamat : Jl. Tanah Merah 54A

No. Telp (HP) : 085749660767

Menyatakan bawah penelitian saya yang berjudul “ **KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA**” adalah murni gagasan yang belum saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 20 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Adelia Nurlailita Rahmadany

NPM: 20300015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Saya Adelia Nurlailita Rahmadany dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” Karakteristik Pemberian Abolisi Dalam Praktek ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mama, papa, suami dan keluarga saya, yang selalu memberikan dukungan moral dan materil. Karena keberadaan mereka merupakan sumber motivasi yang tiada henti dalam memberikan kekuatan di setiap langkah perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga segala pengorbanan serta doa mereka dibalas dengan kebaikan.

Dengan tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas bimbingan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., atas kepemimpinan dan visi yang menginspirasi pengembangan pendidikan. Semoga langkah dan kebijakan yang diambil membawa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menuju prestasi gemilang.

2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas arahan, masukan, dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
3. Dr, Fani Martiawan Kumara Putra, S,H.,M.H.,CCD.,CMC.,CLA. Selaku Wakil Dekan, yang telah memberikan dukungan dan perhatian selama masa studi saya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung bagi para mahasiswa.
4. Dosen Wali, Ibu Shanti Wulandari, S.H., atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H. Yang telah berkontribusi dalam memberikan saran dan kritik yang konstruktif terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi selama masa studi saya. Setiap pelajaran dan pengalaman yang diberikan sangat berharga dan telah membentuk pemahaman serta keterampilan saya di bidang hukum. Dedikasi dan komitmen Bapak/Ibu dalam mendidik mahasiswa patut dicontoh dan sangat mempengaruhi perjalanan akademik saya.
7. Staf Tata Usaha, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses studi saya.
8. Teman-teman sejawat, yang telah menjadi sumber dukungan dan motivasi selama perjalanan studi ini. Kebersamaan kita dalam melewati berbagai tantangan dan berbagi ilmu telah membuat pengalaman yang lebih berarti,. Sehingga kita telah

berhasil mencapai tahap ini Bersama-sama. Semoga kita semua dapat terus berkolaborasi dan meraih kesuksesan di masa depan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengakui bahwa skripsi ini telah mencapai tahap final. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas.

Surabaya, 20 Januari 2026

Adelia Nurlailita Rahmadany

20300015

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji karakteristik pemberian abolisi dalam praktik hukum tata negara di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari masa Orde Lama hingga era Reformasi. Abolisi, sebagai hak prerogatif presiden, memiliki dasar konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun pelaksanaannya memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik abolisi bervariasi di setiap periode pemerintahan, mulai dari instrumen stabilitas politik dan keamanan pada Orde Lama dan Baru, hingga tindakan hukum rekonsiliatif yang bersifat individual pada era Reformasi. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis prosedur pelaksanaan pemberian abolisi dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 (kasus korupsi Tom Lembong) dan Keputusan Presiden No. 449 Tahun 1961 (kasus pemberontakan politik), untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian dan keabsahan bahan hukum primer dan sekunder, serta relevansi Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1954 dengan kondisi hukum dan sosial saat ini. Penelitian ini juga menganalisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst terkait kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, untuk memahami pertimbangan hakim dan implikasi putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemberian abolisi sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum pada setiap periode pemerintahan. Pada masa Orde Lama dan Baru, abolisi cenderung digunakan sebagai instrumen stabilitas politik dan keamanan, dengan kewenangan penuh berada di tangan presiden. Sementara pada era Reformasi, pemberian abolisi lebih menekankan pada tindakan hukum rekonsiliatif yang bersifat individual, dengan pertimbangan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur pemberian abolisi melibatkan inisiasi, pertimbangan Mahkamah Agung, persetujuan DPR, dan penerbitan Keputusan Presiden. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan perlunya pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif tentang abolisi dan amnesti, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian abolisi, serta penguatan peran dan independensi lembaga pengawas.

Kata Kunci: Abolisi, Hukum Tata Negara, Hak Prerogatif Presiden, Stabilitas Politik, Rekonsiliasi, Reformasi Hukum.

ABSTRACT

This thesis examines the characteristics of granting abolition in the practice of constitutional law in Indonesia, focusing on changes from the Old Order to the Reformation era. Abolition, as a presidential prerogative, has a constitutional basis as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution, but its implementation requires consideration by the House of Representatives (DPR). This study aims to analyze how the characteristics of abolition vary across government periods, from an instrument of political stability and security during the Old and New Orders to individual reconciliation legal measures during the Reformation era. Furthermore, this thesis also analyzes the procedures for granting abolition in Presidential Decree No. 18 of 2025 (the Tom Lembong corruption case) and Presidential Decree No. 449 of 1961 (the political rebellion case), to understand the differences and similarities in their application.

The research method used is normative legal research, with a statute approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and Emergency Law No. 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition. Secondary legal materials include law books, legal journals, papers, articles, and relevant scientific papers. The analysis was conducted by evaluating the suitability and validity of the primary and secondary legal materials, as well as the relevance of Emergency Law No. 11 of 1954 to current legal and social conditions. This study also analyzed Decision No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, concerning the sugar import corruption case involving Tom Lembong, to understand the judges' reasoning and the implications of the decision.

The results show that the characteristics of amnesty grants are strongly influenced by the political and legal context of each government period. During the Old and New Order eras, amnesty tended to be used as an instrument of political stability and security, with full authority vested in the president. Meanwhile, during the Reformation era, amnesty grants placed more emphasis on individual, reconciliatory legal action, with more transparent and accountable considerations. This study also found that the procedure for granting abolition involves initiation, consideration by the Supreme Court, approval by the House of Representatives (DPR), and issuance of a Presidential Decree. Therefore, this thesis recommends the need for the creation of more comprehensive legislation on abolition and amnesty, increased transparency and accountability in the abolition process, and strengthening the role and independence of oversight institutions.

Keywords: Abolition, Constitutional Law, Presidential Prerogative, Political Stability, Reconciliation, Legal Reform.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	III
KATA PENGANTAR	IV
SURAT ORISINALITAS.....	VI
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. KERANGKA KONSEPTUAL	5
E. METODE PENELITIAN	6
F. SISTEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN	12
BAB II KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA	14
2.1 Karakteristik Pemberian Abolisi Dalam Ke Tata Negara.....	14
2.1.1 Karakteristik Abolisi Pada Orde Lama (1945-1966)	14

2.1.2	Karakteristik Abolisi Pada Orde Baru (1996-1998).....	25
2.1.3	Karakteristik Abolisi Pada Reformasi (1998-Sekarang)	39
2.2	Proses Pemberian Abolisi Dalam Ke Tata Negara	49
2.2.1	Proses Pemberian Abolisi Pada Masa Orde Lama	62
2.2.2	Proses Pemberian Abolisi Pada Masa Orde Baru	68
2.2.3	Proses Pemberian Abolisi Pada Masa Reformasi	75
	A. Awal Reformasi	
	B. Setelah UUD 1945 Di Amandemen	

BAB III KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA 88

3.1 Konsistensi dengan Dasar Hukum dan Prosedur Pemberian Abolisi.88

3.1.1 Kesesuaian Antara Pemberian Abolisi Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Oleh Presiden Soekarno 88

3.1.2 Kesesuaian Antara Pemberian Abolisi Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Oleh Presiden Suharto.....93

3.1.3 Kesesuaian Antara Pemberian Abolisi Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Oleh Presiden BJ. Habibie Pada Awal Reformasi..... 95

3.1.4 Kesesuaian Antara Pemberian Abolisi Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Oleh Presiden Abdurrahman Wachid (Gus Dur) Setelah UUD 1945 Di Amandemen

99

3.2 Pertimbangan Politik dan Implikasi Hukum..... 102

3.2.1 Pertimbangan Politik Dan Implikasi Hukum Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Presiden Soekarno...102

3.2.2 Pertimbangan Politik Dan Implikasi Hukum Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Presiden Suharto 106

3.2.3 Pertimbangan Politik Dan Implikasi Hukum Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Presiden BJ. Habibi...109

3.2.4 Pertimbangan Politik Dan Implikasi Hukum Dalam Keppres No. 18 Tahun 2025 Dengan Praktik Pemberian Abolisi Presiden BJ. Habibie

115

BAB IV PENUTUP..... 118

A. KESIMPULAN 118

B. SARAN.....119

DAFTAR PUSTAKA